

## DAMPAK BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI: PENDEKATAN PERSAMAAN SIMULTAN

NURUL IMAMAH  
nurul.imama@yahoo.com  
Universitas Bhayangkara Surabaya

### Abstract

This study aims to find solutions to the problems of increasing economic growth and regional spending by research models involving regional expenditure variables and economic growth. This research also attempts to fill the gap in the need for regional expenditure development as regional spending can affect economic growth. This research was conducted by building an econometric model in a simultaneous equation system using panel data and estimated using the Two Stage Least Squares method (2SLS). The results of the analysis show that. Regional expenditure has a positive and significant effect on regional economic growth. This is in accordance with Hartati's recommendations, (2012); Marta Pascual and Santiago  $\text{\textit{Ivarez-García}}$  (2006); Jamzani Sodik (2007); Wibisana (2014); (Amelia, 2013); (Adrian, 2013); but contrary to the findings of Agus Bagiyanto, (2015); Febian, (2014), as well as the factors that affect regional income and regional spending in each region are relatively the same.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah dengan model penelitian yang melibatkan variable belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga berupaya mengisi gap pada kebutuhan pengembangan belanja daerah sebagaimana belanja daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan membangun model ekonometrika dalam system persamaan simultan dengan menggunakan data panel dan diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Hartati, (2012); Marta Pascual dan Santiago  $\text{\textit{Ivarez-García}}$  (2006); Jamzani Sodik (2007); Wibisana, (2014); Amelia, (2013); (Adrian, 2013); namun berlawanan dengan hasil temuan Agus Bagiyanto, (2015); Febian, (2014), serta faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah dan belanja daerah pada masing-masing daerah relatif sama.

*Keyword* : Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan ekonomi, Belanja daerah, Simultan, 2SLS.

### 1. PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Menurut Jhingan (2008), peranan belanja pemerintah dalam pembangunan ekonomi terletak dalam peningkatan laju pertumbuhan perekonomian, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran, mendorong inisiatif dan usaha swasta, dan mewujudkan keseimbangan perekonomian regional. Oleh karena itu jika tujuan pembangunan ekonomi di suatu negara adalah untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat maka penetapan kebijakan belanja pemerintah harus dilakukan sebaik-sebaiknya. Belanja pemerintah daerah (provinsi

maupun kabupaten/kota) dalam APBD dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, belanja ini lebih bersifat sebagai akumulasi stok capital, dan diharapkan pemerintah lebih meningkatkan alokasi belanja langsung agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya realisasi penerimaan dan pengeluaran baik dalam APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur adalah seimbang. Bila APBD merupakan besaran anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, maka PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian daerah Jawa Timur lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kinerja perekonomian daerah dapat digambarkan dari beberapa indikator: kinerja fiscal daerah, pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan angka Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat suatu daerah, terutama indikator pertumbuhan ekonomi. (RPJM Nasional, 2010-2014). Pembangunan di Jawa Timur harus memposisikan belanja daerah sebagai instrumen untuk mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sedangkan pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bentuk peran pemerintah dalam mengatur perekonomian, apabila dibandingkan dengan PDRB, peran pengeluaran pemerintah cenderung sangat kecil. Namun demikian, peran pengeluaran pemerintah daerah dalam perekonomian tidak dilihat dari besar kecilnya nominal, tetapi dari nilai kebijakan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi (PDRB), harus mampu mempengaruhi perekonomian di daerah tersebut. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang memiliki peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Adolf Wagner, (1890), mendeskripsikan pengeluaran pemerintah sebagai representasi dari tingkat pendapatan yang dimiliki pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan biaya atau anggaran yang sedang atau akan dikeluarkan pemerintah untuk membiayai seluruh program dan kegiatan ekonomi pemerintah. Aspek pengeluaran pemerintah provinsi Jawa Timur berasal dari dua pos yaitu pos anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, sehingga dapat dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peranan yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Beberapa kajian empiris mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan memberikan hasil yang berbeda. Marta Pascual dan Santiago Álvarez-García (2006) meneliti pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di negara Eropa. Kesimpulan yang diperoleh adalah hubungan antara pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat positif atau negatif tergantung dari negara yang menjadi sampel penelitian. Seperti halnya penelitian ini yang mengalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Jamzani Sodik (2007) Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia. Penelitian Jamzadi Sodik (2007) memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu studi kasus yang sama dan membahas mengenai pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang memberi hasil positif dan signifikan dilakukan oleh (Wibisana, 2014); Belanja barang dan jasa berpengaruh secara positif dan signifikan, tetapi belanja modal berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, (Febrian, 2014). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tidak monoton tetapi dapat mengoptimalkan tingkat pertumbuhan ekonomi, (Amelia, 2013), Dalam jangka pendek, belanja modal memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (Adrian, 2013).

Sedangkan penelitian yang dilakukan Agus Bagianto (2015), dengan judul: Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kota Dan Kabupaten di Jawa Barat). Penelitian ini dilaksanakan pada kota dan kabupaten

di Jawa Barat. Tujuan penelitian meliputi untuk mengetahui adakah pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan adakah implikasi pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kota dan kabupaten di Jawa Barat. Belanja daerah di rumuskan menjadi dua permasalahan yaitu belanja operasi dan belanja modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan Regresi Data Panel Model least Square dilakukan terhadap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Data runtut waktu dari tahun 2009 sampai dengan 2013, dengan time lag (periode tahun sebelumnya). Cross Section adalah jumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat yang berjumlah 26, sedangkan observasi berjumlah 104 karena ada time lag masing-masing kota dan kabupaten yang berjumlah 26 entitas. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara belanja operasi daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara belanja modal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Belanja operasi daerah dan belanja modal daerah secara bersama-sama/simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat implikasi positif yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terbukti tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara belanja operasi dan belanja modal secara bersama-sama/simultan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan pertumbuhan ekonomi berimplikasi positif yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah

Walaupun beberapa penelitian tentang belanja daerah serta pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan namun hasilnya tidak konsisten. Ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai belanja daerah serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai hasil penelitian diatas menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam menentukan belanja daerah sangat diperlukan, karena memainkan peranan penting dalam kebijakan fiskal untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba menggali lebih detail tentang belanja daerah serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara khusus penelitian ini mengkaji factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan belanja daerah, serta mengkaji dampak belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian dan beberapa kajian empiris di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana belanja daerah berdampak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan Factor-faktor apa saja yang mempengaruhi belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan dampak belanja daerah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, menanggulangi kemiskinan, dan mengatasi inflasi, (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2009). Kebijakan Fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan belanja pemerintah. (Brodjonegoro, 2002). Kebijakan fiskal daerah kabupaten/kota di Jawa Timur diharapkan dapat menstimulus perekonomian daerah secara berkesinambungan dan berkualitas. Variabel fiskal daerah meliputi penerimaan daerah dan belanja daerah. Kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk percepatan kesejahteraan rakyat (RPJMN 2010-2014). Pada Undang Undang No. 23 Tahun 2014, konsep otonomi: (1) *General Competency* untuk kabupaten/kota; (2) Terjadi pembagian kewenangan antara pemerintah daerah propinsi, dan kabupaten/kota, (3) Berlaku prinsip subsidiarity (*concurrent*), yaitu kewenangan di setiap bidang dan dapat dibagi antar tingkatan pemerintahan. Kebijakan desentralisasi fiskal berkaitan dengan penerimaan dan belanja pemerintah, sehingga belanja pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal mengutamakan pengalihan tugas pengeluaran (*expenditure assignments*) secara penuh, dimana

pemerintah daerah meningkatkan belanja daerah sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (Kuncoro, 2004). Hipotesis Tiebout ini sejalan dengan teorema desentralisasi, bahwa dengan hipotesis ini akan meningkatkan kesejahteraan dari adanya desentralisasi. Perpindahan penduduk sesuai dengan preferensinya dengan pertimbangan batasan yang dimiliki akan menggeser trade-off antara otonomi lokal dengan standar nasional ke arah otonomi lokal sebab adanya peningkatan homogenitas preferensi antara wilayah-wilayah.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah pertumbuhan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Teori Pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang bersumber dari dalam suatu system, (Romer,2007). Tiga elemen utama dalam model Romer yaitu: (1) adanya unsur eksternalitas, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan, (2) adanya peningkatan skala hasil yang semakin meningkat, menyebabkan peningkatan spesialisasi dan pembagian kerja, (3) semakin pendek waktu pemanfaatan ilmu pengetahuan, karena pesatnya perkembangan di sektor riset. Secara umum model Romer dirumuskan sebagai berikut:  $Y_i = AK_i^\alpha L_i^{1-\alpha} K^\beta$ , dimana:  $Y_i$  adalah output produksi perusahaan  $i$ ,  $K_i$  adalah stok modal,  $L_i$  adalah tenaga kerja,  $A$  adalah stok pengetahuan/teknologi (*technical knowledge*) agregat diasumsikan berefek menyebar secara positif terhadap produksi pada setiap perusahaan.

Etzo (2008), menyatakan model perlumbuan endogen dikembangkan dari tiga pemikiran: (1) model Romer, (1986), *diminishing returns* dari kapital dieliminasi oleh *knowledge spillovers* yang dihasilkan investasi, asumsi stok pengetahuan akan meningkat dengan meningkatnya investasi melalui *learning-by-doing process*. (2) Lucas human capital model, (1988), terdapat dua sektor, yaitu sektor memproduksi modal fisik dan modal manusia, produksi modal manusia dapat memperbaiki teknologi dan menutup kerugian dari adanya *diminishing return* modal fisik, (3) Romer,(1990),Grossman, Helpman, (1991), kemajuan teknologi ditentukan secara endogen oleh ide baru dari hasil Research and Development.

Barro, (1990), meletakkan konsep desentralisasi fiskal dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi endogen, pada tahun 1990, membangun model dengan landasan model pertumbuhan ekonomi endogen dan membedakan antara investasi swasta dan investasi publik, dengan model pertumbuhan ekonomi yang bersifat *constant-returns*. Diasumsikan sumber pendapatan pemerintah berasal dari pajak dengan anggaran berimbang. Peningkatan pengeluaran pemerintah diikuti dengan peningkatan pajak, dan sebaliknya. Pengembangan pengeluaran pemerintah, mengacu pada teori pertumbuhan endogen, dimana pengeluaran pemerintah sebagai instrumen utama dalam pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 1993; 169). Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003; 263). Secara makro teori pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Wagner dalam teorinya "*The Law of Expanding State Expenditure*" yaitu hukum perkembangan pengeluaran pemerintah, menyatakan apabila pendapatan perkapita dalam perekonomian meningkat maka pengeluaran pemerintah akan meningkat, Mangkoesobroto (2010). Pengeluaran pemerintah daerah merupakan nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah ditinjau dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program. Pengeluaran pemerintah ditinjau dari belanja langsung adalah belanja yang digunakan untuk program dan kegiatan yang direncanakan.

Berbagai studi tentang pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan yang digunakan sebagai referensi a.l.: Hartati, 2012, bahwa komposisi terbesar belanja pemerintah untuk belanja rutin dan pelayanan umum, porsi belanja modal rendah, yang berdampak pada rendahnya ruang fiskal pemerintah, sehingga fungsi stimulus fiskal tidak optimal mendorong

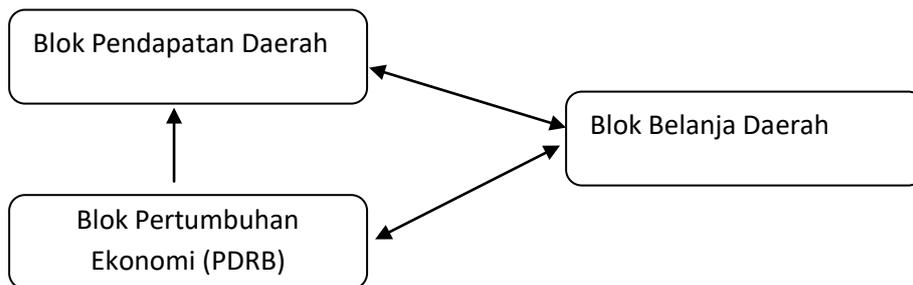
pertumbuhan investasi swasta dan kinerja ekspor. Rendahnya peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan, karena komposisi belanja yang tidak proporsional dan tidak efektif. Nugroho, 2017, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat penduduk bekerja berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan; belanja daerah memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat penduduk bekerja dalam menurunkan kemiskinan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan gabungan dari data time series dan cross section yang disebut data panel (pool data). Unit data yang digunakan adalah kabupaten/kota di propinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2017. Penelitian ini mengasumsikan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi Jawa Timur relatif sama. Data utama adalah Pendapatan daerah, Belanja daerah, PDRB, serta data pendukung lainnya yang diperoleh dari BPS Jawa Timur, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta media elektronik dan media cetak. Konsep dan penghitungan pendapatan daerah mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 2. Pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lainnya. Dana perimbangan adalah transfer fiskal yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi DAU, DAK, bagi hasil pajak, dan bagi hasil sumber daya alam. Sedangkan, rincian anggaran secara detail berdasarkan urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31, dimana klasifikasi keuangan daerah dirinci berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis pengeluaran, dimana belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Agar sesuai dengan tujuan studi maka klasifikasi yang digunakan berdasarkan urusan dalam format Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu (1) belanja pertanian terdiri dari ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan; (2) belanja industri terdiri dari industri, koperasi dan UMKM; (3) belanja jasa terdiri dari perdagangan dan pariwisata; (4) belanja infrastruktur terdiri dari pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi serta penanaman modal; (5) belanja pendidikan dan kesehatan terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Data perekonomian meliputi PDRB sektoral, diklasifikasikan menjadi: (1) sektor pertanian; (2) sektor industri pengolahan; (3) sektor jasa. Agar terbanding antartahun, data nominal diubah ke dalam data riil dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) kabupaten kota, karena data tidak tersedia, maka dihitung sebagai rata-rata IHK umum beberapa kabupaten/kota yang tersedia.

Model Persamaan Simultan dinamis merupakan model ekonometrik yang disusun berdasarkan kerangka pemikiran menggunakan variabel-variabel yang relevan dalam tataran teori ekonomi, konsep, dan kajian studi-studi empiris terdahulu. Spesifikasi model ekonometrik tersebut terdiri dari beberapa persamaan struktural dan identitas yang dikelompokkan ke dalam blok pendapatan daerah, belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan antarblok disajikan pada Gambar 2. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan model persamaan simultan dengan data panel. Model ini mempunyai lebih dari satu variabel endogen dan lebih dari satu persamaan yang membentuk suatu sistem persamaan dan hubungan yang terjadi lebih dari satu arah. (Lains: 2006).

Kerangka model belanja daerah sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan keterkaitan antar blok yang masing-masing blok terdiri persamaan struktural dan persamaan identitas. Setiap blok mempunyai hubungan berbeda, yaitu: Blok pertumbuhan ekonomi (PDRB) dipengaruhi Blok belanja daerah. Blok belanja daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan blok pendapatan daerah. Keterkaitan antar blok tampak pada gambar 2 di bawah ini:



**Gambar 2**  
Keterkaitan Antar Blok dalam Model Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Belanja Daerah.

#### 4. SPESIFIKASI MODEL

Pada tahap ini dirumuskan model ekonometrika persamaan simultan terdiri dari persamaan struktural dan persamaan identitas. Persamaan struktural merupakan representasi dari variabel endogen dan eksogen yang secara operasional menghasilkan tanda dan besaran nilai estimasi parameter sesuai dengan harapan teoritis. Spesifikasi modelnya, antara lain:

##### I. Blok Pendapatan Daerah

$$\text{I.1 Total Pendapatan Daerah : } TPD_{it} = PAD_{it} + DPER_{it} + PDL_{it}$$

$$\text{1. Pendapatan Asli Daerah: } PAD_{it} = TXD_{it} + RET_{it} + BUMD_{it} + PADL_{it}$$

##### a. Pajak Daerah

$$TXD_{it} = a_0 + a_1 BTL_{it} + a_2 PDRB_{it} + a_3 POP_{it} + a_4 LW_{it} + a_5 TXD_{it-1} + u_{lit}$$

Parameter yang diharapkan  $a_1, a_2, a_3, a_4 > 0$  dan  $0 < a_5 < 1$

##### b. Retribusi Daerah

$$RET_{it} = b_0 + b_1 BL_{it} + b_2 PDRB_{it} + b_3 POP_{it} + b_4 RET_{it-1} + u_{2it}$$

Parameter yang diharapkan:  $b_1, b_2, b_3 > 0$  dan  $0 < b_4 < 1$

##### c. Dana Perimbangan

$$DPER_{it} = DBH_{it} + DAU_{it} + DAK_{it}$$

##### c.1. Dana Bagi Hasil

$$DBH_{it} = c_0 + c_1 BTL_{it} + c_2 BL_{it} + c_3 PDRB_{it} + c_4 LW_{it} + c_5 POP_{it} + c_6 DBH_{it-1} + u_{3it}$$

Parameter yang diharapkan:  $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 > 0$  dan  $0 < c_6 < 1$

##### c.2. Dana Alokasi Umum

$$DAU_{it} = d_0 + d_1 BTL_{it} + d_2 PDRBKAP_{it-1} + d_3 PNS_{it} + d_4 JMIS_{it-1} + d_5 POP_{it} + d_6 LW_{it} + d_7 DAU_{it-1} + u_{4it}$$

Parameter yang diharapkan:  $d_2, d_4 < 0$ ;  $d_1, d_3, d_5, d_6 > 0$  dan  $0 < d_7 < 1$

##### c.3. Dana Alokasi Khusus

$$DAK_{it} = e_0 + e_1 BTL_{it} + e_2 KAPFIS_{it} + e_3 PDRBKAP_{it-1} + e_4 JMIS_{it-1} + e_5 LW_{it} + e_6 POP_{it} + e_7 DAK_{it-1} + u_{5it}$$

Parameter yang diharapkan  $e_1, e_2, e_4, e_5 > 0; e_3, e_6 < 0$ , dan  $0 < e_7 < 1$

Kapasitas fiskal daerah

$$KAPFIS_{it} = PAD_{it} + DBH_{it}$$

## II. Blok Belanja Daerah

II.1 Total belanja daerah :  $TBD = BL_{it} + BTL_{it}$

### 1. Belanja Tidak Langsung

$$BTL_{it} = a_0 + a_1 PDRB_{it} + a_2 LW_{it} + a_3 POP_{it} + a_4 PAD_{it} + a_5 DBH_{it} + a_6 DAU_{it} + a_7 BTL_{it-1} + u_{1it}$$

Parameter yang diharapkan  $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 > 0$  dan  $0 < a_7 < 1$

### 2. Belanja langsung :

$$BL_{it} = BLSA_{it} + BLIND_{it} + BLJS_{it} + BLDIKES_{it} + BLINF_{it}$$

a. Belanja langsung untuk sektor pertanian :

$$BLSA_{it} = b_0 + b_1 PAD_{it} + b_2 DPER_{it} + b_3 LW_{it} + b_4 PDRBSA_{it} + b_5 BLINF_{it} + b_6 POP_{it} + b_7 BLSA_{it-1} + u_{2it}$$

Parameter yang diharapkan  $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6 > 0$  dan  $0 < b_7 < 1$

b. Belanja langsung untuk sektor industri :

$$BLIND_{it} = c_0 + c_1 PAD_{it} + c_2 DPER_{it} + c_3 PDRBIND_{it} + c_4 POP_{it} + c_5 LW_{it} + c_6 BLIND_{it-1} + u_{3it}$$

Parameter yang diharapkan  $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5 > 0$  dan  $0 < c_6 < 1$

c. Belanja langsung untuk sektor jasa :

$$BLJS_{it} = d_0 + d_1 PAD_{it} + d_2 DPER_{it} + d_3 PDRBJS_{it} + d_4 POP_{it} + d_5 LW_{it} + d_6 BLJS_{it-1} + u_{4it}$$

Parameter yang diharapkan  $d_1, d_3, d_2, d_3, d_5 > 0$  dan  $0 < d_6 < 1$

d. Belanja langsung untuk sektor infrastruktur (sarana/ prasarana) :

$$BLINF_{it} = e_0 + e_1 PAD_{it} + e_2 DPER_{it} + e_3 LW_{it} + e_4 PDRBKAP_{it} + e_5 POP_{it} + e_6 BLINF_{it-1} + u_{5it}$$

Parameter yang diharapkan  $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 > 0$  dan  $0 < e_7 < 1$

e. Belanja langsung untuk sektor pendidikan dan kesehatan :

$$BLDIKES_{it} = f_0 + f_1 PAD_{it} + f_2 DPER_{it} + f_3 POP_{it} + f_4 PDRBKAP_{it} + f_5 LW_{it} + f_6 BLINF_{it} + f_7 BLDIKES_{it-1} + u_{6it}$$

Parameter yang diharapkan  $f_6 < 0; f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 > 0$  dan  $0 < f_8 < 1$

$$PDRBKAP_{it} = PDRB \text{ Perkapita} = PDRB_{it} / POP_{it} * 1000$$

## III. Blok Pertumbuhan Ekonomi

1. Sektor Pertanian

$$PDRBSA_{it} = a_0 + a_1 BLINF_{it} + a_2 TKSA_{it} + a_3 BLSA_{it} + a_4 LW_{it} + u_{8it}$$

Parameter yang diharapkan  $a_1, a_2, a_3, a_4 > 0$

## 2. Sektor Industri

$$PDRBIND_{it} = b_0 + b_1 BLINF_{it} + b_2 TKIND + b_3 BLIND + u_{9,it}$$

Parameter yang diharapkan  $b_1, b_2, b_3 > 0$

## 3. Sektor Jasa

$$PDRBJS_{it} = c_0 + c_1 BLINF_{it} + c_2 TKJS_{it} + c_3 BLJS_{it} + u_{10,it}$$

Parameter yang diharapkan:  $c_1, c_2, c_3 > 0$

$$\text{Total PDRB: } PDRB_{it} = PDRBSA_{it} + PDRBIND_{it} + PDRBJS_{it}$$

Keterangan:

BL = Belanja langsung riil (Rp miliar)

BTL = Belanja tidak langsung riil (Rp miliar)

$BTL_{it-1}$  = Belanja tidak langsung riil tahun t-1 (Rp miliar)

BLSA = Belanja langsung untuk sektor pertanian riil (Rp miliar)

$BLSA_{it-1}$  = Belanja langsung untuk sektor pertanian riil tahun t-1 (Rp miliar)

BLIND = Belanja langsung untuk sektor industri riil (Rp miliar)

$BLIND_{it-1}$  = Belanja langsung untuk sektor industri riil tahun t-1 (Rp miliar)

BLJS = Belanja langsung untuk sektor jasa riil (Rp miliar)

$BLJS_{it-1}$  = Belanja langsung untuk sektor jasa riil tahun t-1 (Rp miliar)

BLDIKES = Belanja langsung untuk sector pendidikan dan kesehatan riil (Rp miliar)

$BLDIKES_{it-1}$  = Belanja langsung sector pendidikan dan kesehatan riil tahun t-1 (Rp miliar) BLINF =

Belanja langsung untuk sector sarana/ prasarana (infrastruktur) riil (Rp miliar)

$BLINF_{it-1}$  = Belanja langsung untuk sector infrastruktur riil tahun t-1 (Rp miliar)

BUMD = Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah riil (Rp miliar)

DAU = Dana alokasi umum (Rp milyar)

$DAU_{it-1}$  = Dana alokasi umum tahun t-1 (Rp milyar)

DAK = Dana alokasi khusus (Rp milyar)

$DAK_{it-1}$  = Dana alokasi khusus tahun t-1 (Rp milyar)

DBH = Dana bagi hasil riil (Rp milyar)

$DBH_{it-1}$  = Dana bagi hasil riil tahun t-1 (Rp milyar)

DPER = Dana perimbangan

i = Kabupaten ke 1, 2, ... 38

JMIS = Jumlah Penduduk Miskin (orang)

$JMIS_{it-1}$  = Jumlah Penduduk Miskin tahun t-1 (orang)

KAPFIS = Kapasitas fiskal (Rp milyar)

LW = Luas wilayah (km<sup>2</sup>)  
 PAD = Jumlah pendapatan asli daerah riil (Rp miliar)  
 PADL = Jumlah pendapatan asli daerah lainnya riil (Rp miliar)  
 PDL = Pendapatan lainnya (juta Rp)  
 POP = Jumlah penduduk (juta jiwa)  
 PDRBSA = PDRB sektor pertanian riil (Rp miliar)  
 PDRBIND = PDRB sektor industri riil (Rp miliar)  
 PDRBJS = PDRB sektor jasa riil (Rp miliar)  
 PDRB = PDRB total (Rp milyar)  
 PNS = Jumlah pegawai negeri sipil (orang)  
 RET = Jumlah redistribusi daerah riil (Rp miliar)  
 RET<sub>it-1</sub> = Jumlah redistribusi daerah riil tahun t-1 (Rp miliar)  
 TXD = Jumlah pajak daerah riil (Rp miliar)  
 TXD<sub>it-1</sub> = Jumlah pajak daerah riil tahun t-1 (Rp miliar)  
 t = Tahun 2010, 2011, ... 2015  
 TPD = Total pendapatan daerah (juta Rp)  
 TBD = Total belanja pemerintah daerah riil (Rp miliar)  
 TKSA = Tenaga kerja sector pertanian ( orang)  
 TKIND = Tenaga kerja sector industri (orang)  
 TKJS = Tenaga kerja sector jasa ( orang)  
 u = Komponen *error*

## 5. IDENTIFIKASI DAN ESTIMASI MODEL

Proses identifikasi terhadap model persamaan simultan bertujuan untuk menentukan metode dalam mengestimasi parameter. Model ekonometrik persamaan simultan mensyaratkan jumlah persamaan harus sama dengan jumlah peubah endogen. Agar persamaan teridentifikasi, harus memenuhi syarat "*order condition of identification*". Identifikasi model ditentukan atas dasar "*order condition*" sebagai syarat keharusan dan "*rank condition*" sebagai syarat kecukupan. Rumusan identifikasi model persamaan struktural berdasarkan *order condition* ditentukan oleh:  $(K-M) \geq (G-1)$ , Koutsoyiannis (1991),

Keterangan :

K = total variabel dalam model, baik variabel endogen dan variabel *predetermined*

M = jumlah variabel endogen dan eksogen dalam suatu persamaan structural dalam model

G = total persamaan dalam model (jumlah variabel endogen dalam model)

Jika dalam suatu persamaan dalam model menunjukkan kondisi :

1.  $(K - M) > (G-1)$ , persamaan dinyatakan *over identified*
2.  $(K-M) = (G-1)$ , persamaan dinyatakan *exactly identified*
3.  $(K-M) < (G-1)$ , maka persamaan dinyatakan *unidentified*

Jika persamaan teridentifikasi tepat (*exactly identified*), maka estimasi dapat dilakukan dengan metode *Indirect Least Squares* (ILS), jika teridentifikasi berlebih (*over identified*) dapat digunakan metode *two-stage least squares* (2SLS). Model persamaan simultan dalam penelitian ini mempunyai 21 persamaan (G), meliputi 14 persamaan struktural dan 7 persamaan identitas; total variabel (K) sebanyak 32, serta maksimal 7 variabel dalam suatu persamaan (M); sehingga  $K = 32$ ;  $M = 7$  dan  $G = 21$ . Dengan demikian  $K-M=32-7=25$  dan  $G-1=21-1=20$ , maka  $(K-M)>(G-1)$ . Berdasarkan kriteria identifikasi, jumlah variabel (endogen dan eksogen) yang dikeluarkan dari setiap persamaan (K-M) lebih besar dari jumlah variabel endogen dan eksogen dalam model dikurangi satu (G-1), berarti model *over identified* sehingga parameternya dapat diestimasi dengan metode 2 SLS.

## 6. Hasil dan Pembahasan

### 6.1 Hasil Analisis Statistika Deskriptif

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui distribusi frekuensi data dari setiap masing-masing variabel. Deskriptif statistic yang dihitung meliputi jumlah sampel/observasi, nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai data tertinggi (max) dan nilai data terendah (min). Pada table 1 dibawah ini menggambarkan nilai deskriptif statistik dari 32 (tiga puluh dua) variabel penelitian.

Tabel .1.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

No	Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
1	lnpdrb	253	9.986786	1.360004	8.019086	17.89421
2	lnjmis	265	4.508803	1.028614	1.979621	5.682695
3	lnpop	304	13.57892	0.811554	11.70043	16.31056
4	lnblinf	216	11.69429	1.229566	8.25561	14.32337
5	lnun	266	9.911495	0.804867	7.791936	12.03158
6	lnumr	152	14.13205	0.294714	11.98919	14.73485
7	lnbl	266	13.32692	0.588181	11.92308	15.65402
8	lnbtl	266	13.68589	0.542581	12.0984	14.70651
9	lnblsa	220	10.50775	0.739603	8.28692	13.51955
10	lnblind	216	9.106353	0.554267	6.910751	11.27168
11	lnbljs	207	9.246902	0.978208	6.140874	12.96138
12	lnbldikes	219	13.62846	0.589802	11.85474	15.37024
13	lnbumd	266	8.531198	1.072194	6.14564	12.02162
14	ln dau	266	13.56731	0.396072	12.43016	14.45507
15	ln dak	263	11.61465	1.129902	6.049969	13.87306
16	ln dbh	266	11.29824	0.782513	4.094345	14.33792
17	ln dper	266	13.81425	0.463968	12.6251	15.98157
18	ln lw	304	6.522792	1.455101	2.801541	8.662574
19	ln pad	266	11.91567	0.890655	10.30895	15.25358
20	ln padl	266	11.00186	1.028293	7.791605	14.32013
21	ln pdl	266	12.42003	1.071358	10.04319	24.97625
22	ln pdrbsa	161	14.81339	1.753419	11.19484	17.47957
23	ln pdrbind	161	14.91223	1.428506	12.54172	17.936
24	ln pdrbjs	161	14.72606	0.538008	13.70989	15.9946
25	ln ret	266	10.02512	0.790301	8.36637	12.82763
26	ln txd	266	10.60344	1.283843	8.514987	14.95575
27	ln tpd	266	14.15835	0.526624	12.92728	15.8413
28	ln tbd	266	14.2238	0.55329	12.67041	16.73711
29	ln tksa	228	11.50196	1.683048	6.380123	13.32714
30	ln tkind	228	10.71152	0.97443	8.715224	12.81257
31	ln tkjs	228	11.02798	0.684295	9.460009	13.08268
32	ln pdrbkap	228	10.07768	0.655429	9.126252	12.51688

Sumber: Data Diolah (Lampiran, 2018)

## 6.2 Hasil Pengujian Model Regresi Simultan Panel

Hasil pengujian regresi simultan secara keseluruhan tersajikan dalam table 4.2 dan table 4.3 dibawah ini. Pada pembahasan ini hasil pengujian regresi simultan disajikan kedalam dua blok yaitu Blok I Belanja Daerah dan blok II Pertumbuhan Ekonomi. Hasil analisis pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja tidak langsung yang relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung, berarti pemerintah daerah lebih mengutamakan belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. Hal ini sesuai dengan temuan Hartati, (2012). Hasil estimasi persamaan total belanja daerah dari belanja tidak langsung dan belanja langsung menunjukkan bahwa semua persamaan mempunyai tingkat penjelas yang tinggi. Hal ini tampak dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang masing-masing mencapai 0.814 dan 0.959, serta 0,503 yang berarti bahwa masing-masing variabel eksogen yang digunakan dalam persamaan tersebut dapat menjelaskan 81 persen dan 96 serta 50 persen keragaman variabel-variabel endogennya. Dilihat dari nilai statistik uji-F, semua persamaan mempunyai  $Pr > F$  bernilai 0.0000, yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel eksogen yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap variabel endogennya.

Hasil estimasi dari persamaan belanja tidak langsung pemerintah daerah menunjukkan bahwa factor pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja tidak langsung, sementara untuk pertumbuhan ekonomi dan populasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, namun untuk luas wilayah berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan secara statistik. Fakta ini menunjukkan bahwa belanja tidak langsung daerah merespon lebih besar terhadap peningkatan DAU dan dana bagi hasil serta peningkatan PAD. Efek marginal dari peningkatan DAU terhadap belanja tidak langsung daerah menunjukkan angka yang paling besar diikuti dengan PAD dan yang terakhir dana bagi hasil. Hal ini sesuai dengan pendapat Barro, (1990).

Berdasarkan hasil analisis, estimator parameter PDRB sebesar -0.022 berarti mempunyai hubungan yang negatif terhadap belanja tidak langsung, yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sebanyak Rp 1000 berpotensi menurunkan belanja tidak langsung daerah sebesar Rp. 22 per tahun. Untuk populasi, diperoleh hasil estimasi parameter sebesar 0,034 dan mempunyai hubungan yang negatif, ini menunjukkan bahwa peningkatan penduduk suatu daerah sebesar 1000 orang berpotensi menurunkan belanja tidak langsung sebesar Rp 34 per tahun. Respon luas wilayah terhadap perubahan jumlah belanja tidak langsung daerah tidak signifikan. Ini berarti perubahan luas wilayah tidak memberikan respon pada belanja tidak langsung daerah. Hasil estimasi parameter pendapatan asli daerah sebesar 0,094 berarti mempunyai hubungan positif, bila terjadi peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp 1000,- maka akan meningkatkan belanja tidak langsung sebesar Rp 94 per Tahun. Sedangkan untuk estimasi parameter dana bagi hasil diperoleh sebesar 0,060,- artinya dana bagi hasil daerah mempunyai hubungan positif dengan belanja tidak langsung dan bila dana bagi hasil ditingkatkan sebesar Rp 1000,- maka akan terjadi kenaikan belanja daerah sebesar Rp 60,- per Tahun. Sementara estimasi parameter dana alokasi umum diperoleh hasil yang tersebar yaitu sebesar 0,094,- artinya dana alokasi umum mempunyai hubungan positif dengan belanja tidak langsung, artinya apabila dana alokasi umum dinaikkan sebesar Rp 1000,- maka akan terjadi kenaikan belanja tidak langsung sebesar Rp 94 per Tahun.

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja langsung secara signifikan dipengaruhi oleh belanja langsung sector pertanian, belanja langsung sector industri, belanja langsung sector jasa dan belanja langsung sector Pendidikan dan kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa estimasi parameter dari belanja langsung sektor pertanian diperoleh hasil sebesar 0,124, artinya belanja langsung sektor pertanian mempunyai hubungan positif dengan belanja langsung daerah, dan bila belanja langsung sektor pertanian dinaikkan sebesar Rp 1000,- maka belanja langsung akan naik sebesar Rp 124 per Tahun. Estimasi parameter belanja langsung sektor industri sebesar 0, 131,- artinya belanja langsung sektor industri berhubungan positif dengan belanja langsung daerah, jika belanja langsung sektor industri dinaikkan sebesar Rp 1000,- maka belanja langsung daerah akan naik sebesar Rp 131 per Tahun. Sementara hasil estimasi parameter belanja langsung sektor jasa sebesar 0,138, berarti mempunyai hubungan positif dan jika belanja langsung sektor jasa dinaikkan sebesar

Rp 1000,- maka belanja langsung daerah akan naik sebesar Rp 138 per Tahun. Hasil estimasi parameter untuk belanja langsung sektor pendidikan dan kesehatan sebesar 0,437, artinya mempunyai hubungan positif dan bila belanja langsung sektor pendidikan dan kesehatan ditingkatkan sebesar Rp 1000,- maka belanja langsung daerah akan naik sebesar Rp 437 per Tahun. Berdasarkan uraian hasil tersebut di atas blok I belanja daerah dipengaruhi oleh factor-faktor pembentuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dimana faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah dan belanja daerah pada kabupaten/kota di Jawa Timur relatif sama.

Tabel 4.2.  
Blok I Belanja Daerah

Variabel	Total Belanja Daerah (Intbd)	
	Parameter	P-Value
Konstanta	1.438	0.000**
Lnbl	0.326	0.000**
lnbtl	0.616	0.000**
$R^2 = 0.814$	Prob > F = 0.000	
Variabel	Belanja Tidak Langsung (Inbtl)	
	Parameter	P-Value
Konstanta	1.1330	0.191
Lnpdrb	-0.022	0.000**
Lnlw	0.054	0.226
Lnpop	-0.034	0.001**
Inpad	0.094	0.001**
Lndbh	0.060	0.000**
Lndau	0.796	0.000**
Lnbilt-1	3.05E-07	0.000**
$R^2 = 0.959$	Prob > F = 0.000	
Variabel	Belanja Langsung (Inbl)	
	Parameter	P-Value
Konstanta	3.508	0.000**
Lnblsa	0.124	0.010**
Lnblind	0.131	0.020**
Lnbljs	0.138	0.000**
lnbldikes	0.437	0.000**
$R^2 = 0.503$	Prob > F = 0.000	

Keterangan: \*\*) Signifikan pada level 5%

\*) Signifikan pada level 10%

Sumber: Data Diolah (Lampiran, 2018)

Pada pembahasan selanjutnya yaitu blok II Pertumbuhan ekonomi dibagi kedalam sector ekonomi pertanian, sector ekonomi industry dan sector ekonomi jasa. Hasil estimasi persamaan total PDRB yang terdiri dari PDRB sektor pertanian, sektor industri dan jasa menunjukkan bahwa semua persamaan mempunyai tingkat eksogen yang tinggi. Hal ini tampak dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) masing-masing mencapai 0.66 dan 0.814; 0,814; serta 0,814 berarti masing-masing variabel eksogen yang digunakan dalam persamaan tersebut dapat menjelaskan 66 persen dan 81 serta 81 persen keragaman variabel-variabel endogennya. Dilihat dari nilai statistik uji-F, semua persamaan mempunyai Pr > F bernilai 0.0000, yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel eksogen yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap variabel endogennya.

Pada sector pertanian dipengaruhi secara signifikan oleh belanja langsung infrastruktur dan tenaga kerja sector pertanian, namun belanja langsung sektor pertanian dan luas wilayah berpengaruh tidak signifikan pada PDRB sektor pertanian. Hasil estimasi parameter belanja langsung infrastruktur

sebesar 0,055,- artinya mempunyai hubungan positif, bila belanja langsung infrastruktur ditingkatkan sebesar Rp 1000,- maka PDRB sektor pertanian akan naik sebesar Rp 55 per Tahun. Estimasi parameter tenaga kerja sebesar 0,802, artinya berhubungan positif, berarti jika tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian dinaikkan sebesar 1000 orang, maka PDRB sektor pertanian akan naik sebesar Rp 802 per Tahun. Sebagaimana untuk belanja langsung sektor pertanian berhubungan positif tetapi tidak signifikan, begitu juga untuk luas wilayah mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan. Pada sector industry dipengaruhi secara signifikan oleh belanja langsung infrastruktur dan tenaga kerja sector industry, justru belanja langsung sector industry berpengaruh tidak signifikan. Estimasi parameter belanja langsung infrastruktur sebesar 0,025, artinya mempunyai hubungan positif, jika belanja langsung infrastruktur dinaikkan sebesar Rp 1000,- maka PDRB sektor industri akan naik sebesar Rp 25 per Tahun. Estimasi parameter tenaga kerja pada sektor industri sebesar 1,035, berarti mempunyai hubungan positif, bila tenaga kerja pada sektor industri ditambah sebesar 1000 orang, maka PDRB sektor industri akan naik sebesar Rp 1.035 per Tahun. Namun estimasi parameter belanja sektor industri sendiri menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap PDRB sektor industri.

Sedangkan pada sector jasa dipengaruhi secara signifikan oleh belanja langsung sector jasa dan tenaga kerja sector jasa, sedangkan belanja langsung sector infrastruktur mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB sektor jasa. Hasil estimasi parameter belanja langsung sektor jasa sebesar 0,044, artinya mempunyai hubungan positif, yakni jika belanja langsung sektor jasa dinaikkan sebesar Rp 1000,- maka PDRB sektor jasa akan naik sebesar Rp 44 per Tahun. Sedangkan hasil estimasi parameter tenaga kerja pada sektor jasa sebesar 0,784, berarti mempunyai hubungan positif, bila tenaga kerja pada sektor jasa ditambah sebesar 1000 orang, maka PDRB sektor jasa akan naik sebesar Rp 784 per Tahun.

Sebagaimana hasil estimasi parameter PDRB sektor pertanian, PDRB sektor industri, PDRB sektor jasa, belanja langsung, belanja tidak langsung, belanja langsung sektor pertanian, belanja langsung sektor pendidikan dan kesehatan serta upah minimum regional mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi untuk belanja infrastruktur, belanja jasa industri serta jumlah penduduk dan pengangguran mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan untuk belanja langsung sektor industri, jasa, pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja daerah dan upah minimum regional, sesuai dengan rekomendasi Hartati, (2012); Marta Pascual dan Santiago Elvareza-García (2006); Jamzani Sodik (2007); Wibisana, (2014);, (Amelia, 2013); ( Adrian, 2013); namun berlawanan dengan hasil temuan Agus Bagiyanto, (2015); Febian, (2014).

Tabel 4.3.  
Blok II Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Sektor Pertanian (lnpdrbsa)	
	Parameter	P-Value
<i>Konstanta</i>	2.010	0.211
<i>Lnblinf</i>	0.055	0.010**
<i>lnksa</i>	0.802	0.000**
<i>lnblsa</i>	0.268	0.239
<i>lnlw</i>	-0.00004	0.713
$R^2 = 0.66$	Prob > F = 0.000	
Variabel	Sektor Industri (lnpdrbind)	
	Parameter	P-Value
<i>Konstanta</i>	4.564	0.015
<i>Lnblinf</i>	0.025	0.061*
<i>lnkind</i>	1.035	0.000**
<i>Inblind</i>	-1.1122	0.526

$R^2 = 0.814$		Prob > F = 0.000	
Variabel	Sektor Jasa (lnpdrbjs)		P-Value
	Parameter		
Konstanta	5.698	0.000	
Lnblinf	-0.005	0.838	
Lntkjs	0.784	0.000**	
lnbljs	0.044	0.048**	
$R^2 = 0.814$		Prob > F = 0.000	
Variabel	Pertumbuhan Ekonomi (lnpdrb)		P-Value
	Parameter		
Konstanta	-7.498	0.000	
lnpdrbsa	0.046	0.067*	
lnpdrbind	0.356	0.000**	
lnpdrbjs	0.344	0.003**	
Lnbl	0.307	0.012**	
Lnbl	0.359	0.044**	
Lnblinf	0.038	0.521	
Lnblsa	0.017	0.076*	
Lnblind	-0.056	0.203	
Lnbljs	-0.046	0.103	
Lnblrikes	-0.179	0.024**	
Lnpop	-0.038	0.597	
lnun	0.006	0.934	
lnumr	0.033	0.076*	

Keterangan: \*\*) Signifikan pada level 5%

\*) Signifikan pada level 10%

Sumber: Data Diolah (Lampiran, 2018)

## 7. KESIMPULAN DAN SARAN

Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Hartati, (2012); Marta Pascual dan Santiago Elvare-García (2006); Jamzani Sodik (2007); Wibisana, (2014); Budiyanto, (Amelia, 2013); (Adrian, 2013); namun berlawanan dengan hasil temuan Agus Bagiyanto, (2015); Febian, (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah dan belanja daerah pada masing-masing daerah relatif sama.

Berdasarkan hasil analisis maka saran dalam penelitian ini, pertama; sebaiknya pemerintah meningkatkan belanja langsung dan mengurangi belanja tidak langsung agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara signifikan. Kedua; Agar peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara optimal, maka pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan belanja daerah yang seimbang antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barro, R.J. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *The Journal of Political Economy*, 98(5):S103-S125.
- Brojonegoro B, Pakpahan A.T, 2002, "Evaluasi atas Alokasi DAU 2001 dan Permasalahannya; DAU, Konsep, Hambatan, Prospek di Era Otonomi Daerah", LPEM-UI, Jakarta.
- Departemen Keuangan RI. (2009). *Grand Design Desentralisasi Fiskal Indonesia*. [www.dipk.deokeu.go.id/document.Qp/document/article/395/708](http://www.dipk.deokeu.go.id/document.Qp/document/article/395/708).
- \_\_\_\_\_, 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartati, 2012, Dampak Komposisi Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Tingkat Kemiskinan, *Desertasi (S3)*, Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Hyman, N. David, 2010, *Public Finance A Contemporary Application of Theory to Policy*, 10th Edition, North Carolina, State University
- Jamzoni Sodik. 2007, *Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, h.27-36 Universitas Islam Indonesia Jhingan, 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo P. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI, 2011, *Penyusunan model efisiensi belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran*, [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
- Koutsoyiannis, A. 1991, *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods*. Second Edition. Harper and Row Publisher, London.
- Kuncoro, Mudrajad, 2013, *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Ke empat, Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2010. *Ekonomi Publik* Edisi 3. BPFE: Yogyakarta.
- Nugroho, 2017, *Analisis Interaksi Moderasi antara Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Penduduk Bekerja dalam Menurunkan Kemiskinan*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014*.
- Pindyck, R.S. and D.L. Rubinfeld. 1991. *Econometri Models and economic Forecasts*, 3rd Edition. McGraw-Hill, Inc, Singapore.
- Romer, D. 2007. *Advanced Macroeconomics*, 4rd edition. McGraw-Hill Irwin, New York.
- The World Bank. 2014, *Laporan Ekonomi Indonesia, 2014, Membawa Perubahan*, Jakarta: The World Bank.
- Todaro, M.P. 2000. *Economic Development*. Seventh Edition. Addison Wesley Longman. Inc. New York.